

Judul : **Pengkajian dan Pemetaan Kerukunan Serta Kerawanan Sosial Umat Beragama Se-Provinsi Riau**
Tahun : **2008**
Penulis : **Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau**
Kategori : **Sosial, Humaniora dan Budaya**

Kemajemukan masyarakat Indonesia, termasuk di Provinsi Riau, mencakup perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang membentuk struktur sosial majemuk baik secara horizontal maupun vertikal. Di sisi lain, pluralitas ini juga mengandung potensi kerawanan sosial apabila tidak dikelola dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan kondisi kerukunan umat beragama serta mengidentifikasi potensi kerawanan sosial di enam kabupaten/kota di Provinsi Riau, yaitu Bengkalis, Indragiri Hulu, Kampar, Pekanbaru, Rokan Hilir, dan Siak.

Metode penelitian menggunakan pendekatan campuran (mixed methods) yang menggabungkan analisis kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama, pemerintah, dan masyarakat lintas agama, sedangkan data kuantitatif diperoleh melalui penyebaran kuesioner terstruktur kepada responden di lokasi penelitian. Delapan indikator digunakan untuk mengukur tingkat kerawanan sosial, meliputi toleransi antarumat beragama, sikap terhadap pendatang, perbedaan agama, interaksi sosial, penolakan pernikahan beda agama, hingga pandangan terhadap aktivitas budaya dan pendirian rumah ibadah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kerukunan antarumat beragama di Riau tergolong “sedang”, dengan potensi kerawanan tertinggi terdapat di Kabupaten Indragiri Hulu dan Rokan Hilir, sedangkan wilayah Pekanbaru dan Bengkalis menunjukkan kerawanan lebih rendah dengan isu dominan bersifat ekonomi. Faktor ekonomi merupakan pemicu utama konflik di wilayah perkotaan dan industri (hingga 89,97% di Pekanbaru), sementara di daerah pedesaan dan homogen seperti Kampar dan Indragiri Hulu, konflik lebih banyak dipicu oleh faktor primordial seperti penolakan terhadap pendatang baru, pendirian rumah ibadah, dan pernikahan beda agama (dengan tingkat penolakan mencapai hampir 100% di beberapa daerah).

Analisis komparatif lintas wilayah menunjukkan bahwa kerukunan di Riau bersifat eksternal dan bersyarat, di mana hubungan antarumat beragama berjalan harmonis di permukaan, tetapi masih dibatasi oleh batas-batas primordial dan kultural yang kuat. Mayoritas masyarakat (60–73%) menilai penegakan hukum yang adil dan konsisten sebagai cara paling efektif untuk mencegah konflik sosial, dibandingkan dialog antaragama.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya pemerataan ekonomi, peningkatan pendidikan, dan kebijakan pembangunan yang inklusif, serta penguatan peran pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dalam menciptakan ruang publik yang adil bagi semua golongan. Upaya pengentasan

kemiskinan, pemberdayaan masyarakat lokal, dan penguatan nilai-nilai toleransi lintas agama menjadi kunci membangun kerukunan sejati dan civil society multikultural di Provinsi Riau.